

## DAFTAR PUSTAKA

2024. Surat Al-Ahzab Ayat 5 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir. TafsirWeb. <https://tafsirweb.com/7617-surat-al-ahzab-ayat-5.html>.
- A., Triningsih. 2017. Politik Hukum Pendidikan: Analisis Politik Hukum dalam Masa Reformasi. Jurnal Konstitusi. Vol. 14 No. 2. Jakarta. MK Press.
- adminus. 2024. Pengangkatan Anak. Pa-kediri.go.id. <https://www.pa-kediri.go.id/layanan-publik/persyaratan-pendaftaran-pa-kota-kediri/558-pengangkatan-anak>.
- Amiruddin, H Zainal Asikin. 2006. Pengantar Metode Hukum. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Angka 19 Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Angka 28 Lampiran UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan .
- Aslam, Ghina, Muhyidin dan Islamiyati. 2022. Perbandingan Hukum Mekanisme Pengangkatan Anak di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Semarang. Diponegoro Law Jurnal. Vol. 11. No. 2.
- Bachtiar. 2018. Metodi Penelitian Hukum, Tangerang Selatan. UNPAM PRESS.
- Bahar, Afif Faisal. 2021. Studi Perlindungan Hukum Atas Anak Angkat Tanpa Penetapan Pengadilan Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Di Kel. Demaan Kec. Jepara Kab. Jepara. Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 8 No. 2.
- Dicey A. 1987. Introduction To The Study Of The Constitution Fifth edition London Macmillan And Co. New York. Limited The Macmillan Company. Dipublikasikan oleh merdeka.com. Al-Qur'an Surat Al-Ahzab Ayat ke-4. <https://www.merdeka.com/quran/al-ahzab/ayat-4?screen=1>
- Dirdjosisworo, Soedjono. 2010. Pengantar Ilmu Hukum. PT. Raja Grafindo Tinggi. Jakarta.
- Faiz, Pan Mohamad. 2006. Status Hukum Anak Hasil Perkawinan Campuran. Jurnal Hukum <https://jurnalhukum.blogspot.com/2006/09/status-hukum-anak-hasil-perkawinan.html>.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Fauzan, Andi Syamsu Alam dan M. 2008. Hukum Pengangkatan Anak dalam Perspektif Islam. Jakarta. Pena Media.
- Gusri, Ikhbal. 2023. Optimalisasi Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan Dengan Mekanisme Pemanggilan Melalui Surat Tercatat. dipublikasikan oleh Iwan Kartiawan, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/optimalisasi>

- asas-peradilan-cepat-sederhana-dan-biaya-ringan-dengan-mekanisme-pemanggilan-melalui-surat-tercatat-oleh-ikhbal-gusri-s-h-20-7.
- H., Attamimi. 2021. Kumpulan Tulisan A. Hamid S. Attamimi: Gesetzgebungswissenschaft sebagai salah satu upaya menanggulangi hutan belantara Peraturan Perundang-undangan. Jakarta. Fakultas Hukum UI.
- Hadi, Sutrisno. 2000. Metodologi Research. Yogyakarta. Andi Offset.
- Hakim, M Saifudin. 2019. Hukum Adopsi Anak Dalam Islam (Bag. 1). Muslim.or.id. <https://muslim.or.id/52453-hukum-adopsi-anak-dalam-islam-bag-1.html>.
- Harahap, Yahya. 1993. Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama. Jakarta. Pustaka Kartini
- Harahap, Yahya. 2005. Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama. Jakarta. Sinar Grafika.
- Hiariej, Zainal Arifin & Eddy Os. 2021. Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Yogyakarta: Red & White Publishing.
- <https://enacademic.com/.searchall.php?SWord=ratio+legis&stype=0&btype=1>.
- Ibrahim, Jhony. 2006. Teori dan Penelitian Hukum Normatif. Malang. Bayumedia Publishing.
- Institut Agama Islam An Nur Lampung. Pengertian Mahram, Dalil dan Pembagian Mahram, an-nur.ac.id. 2021. <https://an-nur.ac.id/pengertian-mahram-dalil-dan-pembagian-mahram/>.
- Isra, Saldi. 2017. Merampingkan Regulasi. Kompas. <https://www.kompas.id/baca/opini/2017/03/13/merampingkan-regulasi>.
- Kamil, Ahmad dan M. Fauzan. 2017. Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia. Raja Grafindo. Depok.
- Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 13/HUK/1993 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (b).
- Lubis, Sulaikin. 2005. Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia. Jakarta. Kencana.
- M., Budiardjo. 1998. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
- Mardani. 2009. Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah. Jakarta. Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2007. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada group.
- Mas, Marwan. 2009. Pengantar Ilmu Hukum. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Merdeka.com. Al-Qur'an Surat Al-Ahzab Ayat ke-4. <https://www.merdeka.com/quran/al-ahzab/ayat-4?screen=1>.
- Milos, Methew B Dkk. 1992. Analisis Data Kualitatif. Jakarta. Ui Press.
- Milos, Methew B Dkk. 1992. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: Ui Press
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung. Citra Aditya Bakti.

Mujib, Nur. "Sengketa Wali Nikah Antara Seorang Gadis Dengan Ayah kandungnya". Pa-jakartatimur.go.id,t.th. <https://www.pa-jakartatimur.go.id/artikel/362-sengketa-wali-nikah-antara-seorang-gadis-dengan-ayah-kandungnya>.

Musthofa. 2008. Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama. Kencana, Jakarta.

Mutiarany. 2019. Hambatan-Hambatan Adopsi Anak Dari Perkawinan Campuran. Binamulia Hukum. Vol. 8 No. 1.

Nadzir, Mohammad. 2005. Metode Penelitian. Jakarta. Ghalia Indonesia.

PA Muara Teweh. 2024. Apa sih Peradilan Agama? - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Mahkamahagung.go.id. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/apa-sih-peradilan-agama#:~:text=Dasar%20hukum%20peradilan%20agama%20dalam,1989%20tentang%20Peradilan%20Agama%20sebagaimana>.

Pangestu, Dimas Prayoga, Murendah Tjahyani. 2023. Kedudukan Pengangkatan Anak Berdsarkan Itikad Baik Tanpa Penetapan Pengadilan di Kampung Kebon Sayur. Kota Bekasi. Jurnal Krisna Law. Vol. 5. No. 2.

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Pasal 2 Permensos No. 110/HUK/2009.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Pasal 39 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002.

Pasal 39 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002.

Pasal 39 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2002.

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, LNRI Tahun 2008 Nomor 166, TLN Nomor 4916.

Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, LNRI Tahun 2008 Nomor 166, TLN Nomor 4916.

Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Pasal 40 UU No. 23 Tahun 2002.

Pasal 41 UU No. 23 Tahun 2002.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Pasal 98 KUHAP.

Penetapan Pengadilan Nomor: 0486/Pdt.P/2020/PA.Bwi

Pentingnya Akta Kelahiran Bagi Anak. Kompas. <https://nasional.kompas.com/read/2012/03/26/11181641/pentingnya.akta.kelahiran.bagi.anak>.

Permensos No. 110/HUK/2009.

Putri, Nurillah Harry dan Hariyo Sulistiyantoro. Analisis Yuridis Penetapan Status Anak Angkat Yang Telah Berusia Dewasa (Studi Penetapan Pengadilan

- Nomor Perkara: 0486/Pdt.P/2020/Pa.Bwi). *Lex Journal : Kajian Hukum & Keadilan*.
- R., Aditya Z. dan Winata. 2018. Rekontruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Negara Hukum*. Vol. 9.
- Raharjo, Satjipto. 2006. *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Rosyadi, A. Rahmad dan M. Rais Ahmad. 2006. *Formalisasi Syariat Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Islam*. Bogor. Galai Indonesia.
- Rusmini. 2021. PRAKTIK PENGANGKATAN ANAK TANPA PENETAPAN PENGADILAN AGAMA (Studi Kasus Di Desa Sungai Pinang Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan). *Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Kandangan*.
- Sarwono. 2011. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta. Sinar Grafika.
- SEMA RI Nomor 6 tahun 1983 tentang Penyempurnaan SEMA Nomor 2 tahun 1979.
- Soedharyo, Soimin. *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta. Sinar Grafika. 2004.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*. Yogyakarta. Kanisius.
- Soeprapto, Maria Farida. 2006. *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*. Yogyakarta. Kanikus.
- Soimin, Soedaryo. *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung. Alfabeta.
- Sugondo, Lies. *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Perdata Nasional Yang Berekspektif HAM*. *Suara Uldialag*. Vol. 3 No. X.
- Sunggono, Bambang. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta. PT Raja.
- Syafii, Ahmad. 2007. Adopsi Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Perdata, Hukum Adat Dan Hukum Islam. *Jurnal Hunafa*. Vol. 4 No. 1.
- Tika, Moh. Pabundu. 2006. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta. PT Bumi Aksara.
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Usman, Suamiati. 2013. *Kedudukan Hukum Anak Angkat Terhadap Hak Waris*. *Lex Privatum*. Vol. 1. No. 4.

- Usman, Suamiati. 2013. Kedudukan Hukum Anak Angkat Terhadap Hak Waris. Lex Privatum, Vol. 1, No. 4.
- UU No. 23 Tahun 2002.
- UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- V., Immanuel. 2017. Ilmu Perundang-undangan. Yogyakarta. Suluh Media.
- Wahyudin, Sumirat. 2021. Hukum Anak Angkat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif.
- Wangol, Winly A. 2016. Asas Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP. Lex Privatum. Vol. IV No. 7.
- Wardah, Sri dan Bambang Sutyoso. 2007. Hukum Acara Perdata Dan Perkembangannya Di Indonesia. Yogyakarta. Gama Media.
- Yasin, Muhammad. 2018. Peradilan Yang Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan, Hukumonline.com.  
<https://www.hukumonline.com/berita/a/peradilan-yang-sederhana--cepat--dan-biaya-ringan-lt5a7682eb7e074/>.
- Zaini, Muderis. 2002. Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum. Cet. 4. Jakarta. Sinar Grafika.
- Zaini, Muderis. 2007. Adopsi: suatu tinjauan dari tiga sistem hukum. Jakarta. Sinar Grafika.
- Zayyadi, Ach. Hukum Acara Perdata (Diktat Pada mata Kuliah Hukum Perdata).